

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGHADAPI
ERA PERDAGANGAN BEBAS
(Suatu Model Konseptual Dalam Pengembangan IKM)**

A. Harits Nu'man**

Abstrak

Dalam menghadapi persaingan global ini, perlu disusun strategi bersaing yang berpijak pada kompetensi inti (core competence), baik dalam hal harga (price), kualitas (quality), teknologi (technology), maupun fleksibilitas biaya produksi (flexibility cost). Khususnya pada sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan bahkan sampai mampu bertahan dikala Indonesia dilanda badai krisis dan mampu membangkitkan perekonomian nasional. Dalam studi ini ditemukan bahwa peran serta sektor IKM yang memiliki keunggulan komparatif, tidak disertai dengan penguasaan teknologi sebagai dasar pengembangan wilayah berbasis teknologi. Analisis didasarkan pada kemampuan daya saing industri kecil dan menengah berdasarkan konsep pengembangan wilayah berbasis teknologi, yang mengindikasikan bahwa industri kecil dan menengah membutuhkan penguatan teknologi. Model konseptual pengembangan industri kecil dan menengah yang diusulkan mengarah pada kebijakan tentang pengembangan penguatan teknologi pada IKM agar memiliki daya saing di era global, dengan urutan prioritas pada komponen Technoware, Orgaware, Infoware, serta Humanware. Dengan demikian maka diharapkan IKM dapat mempertahankan pasar domestik, menghasilkan produk yang berkualitas dengan sentuhan teknologi.

Kata Kunci : Globalisasi, Daya Saing, Industri, Teknologi.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Persaingan global (*global competition*) muncul pada saat suatu wilayah (dalam hal ini negara) bersaing untuk mendapatkan pangsa

**A. Harits Nu'man, Ir, MT., adalah dosen Tetap Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri

pasar dan kesempatan (*market and opportunity share*). Persaingan bisnis berskala global (*global business*) mendorong industri-industri yang berada dalam suatu wilayah untuk mampu melakukan efisiensi biaya dan diferensiasi produk. Sedangkan persaingan perusahaan secara global (*global company*) timbul karena kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporation*) milik negara-negara maju ingin melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara berkembang, baik dalam bentuk pembangunan pabrik baru, kerjasama patungan (*joint venture*) dengan perusahaan tuan rumah, maupun relokasi industri. Hal ini tentu saja menjadikan persaingan antara perusahaan domestik dan perusahaan global akan semakin ketat, sehingga dikhawatirkan dapat merebut pangsa pasar domestik. Karena itulah, dalam menghadapi persaingan global ini, perlu disusun strategi bersaing yang berpijak pada kompetensi inti (*core competence*), baik dalam hal harga (*price*), kualitas (*quality*), teknologi (*technology*), maupun fleksibilitas biaya produksi (*flexibility cost*).

Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai serta tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin daya dukung lingkungan dan pelestarian alam. Sejauh ini sumberdaya alam dikelola dengan tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kelestarian alam yang akhirnya mengurangi daya dukung dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan ekonomi nasional kabinet terdahulu lebih memprioritaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui industrialisasi berskala besar dan tidak berorientasi pada pemanfaatan bahan baku yang dimiliki sendiri, telah menciptakan struktur ekonomi yang rapuh terhadap gejolak nilai dollar.

Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara, sebab sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian, akan tetapi mampu menjadi sumber penghidupan dan pembangunan masyarakat, dimana strategi industri yang dikembangkan lebih menonjolkan aspek-aspek ekonomi tanpa mempersoalkan apakah industri tersebut menciptakan impor bahan baku, barang modal dan impor jasa lanjutan.

Kondisi di atas mendorong krisis ekonomi yang dialami Indonesia menjadi begitu lama, bahkan lebih lama dari negara Asia Tenggara lainnya. Kenyataan ini memaksa kita untuk berfikir ulang mengenai strategi industri yang kita jalankan agar kita dapat segera bangkit, lebih *survive* dan tumbuh.

Dalam menghadapi era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan nasional dengan paradigma baru.

Era reformasi yang berkembang sejak 1998 telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Pemusatan kekuatan ekonomi nasional pada sekelompok tertentu telah surut seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan (industri kecil dan menengah). Perubahan paradigma tersebut telah berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari beberapa indikator ekonomi.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan peluang untuk tumbuh berkembangnya kegiatan-kegiatan baru yang produktif dan sekaligus juga merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara seksama. Untuk itu, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dalam perekonomian global. Hal ini disebabkan dalam era globalisasi kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang/jasa yang laku diseluruh dunia dalam arti mampu bersaing secara global dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi.

Perubahan cepat sebagai dampak globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk semakin mempercepat kesejajaran dan kesetaraan dengan bangsa lain. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang lebih besar semakin dituntut untuk meningkatkan daya saing nasional. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa yang berbasis sumberdaya lokal diperlukan peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

Permasalahan yang paling krusial adalah apakah dengan kondisi tersebut, IKM sanggup untuk menghadapi tantangan di era global ini. Implikasinya adalah pasar domestik sebagai pasar dari produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah akan menjadi incaran industri kecil dan menengah dari negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN (AFTA) bahkan dari seluruh dunia (WTO) .

Oleh karena itu maka pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah harus mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Sehingga industri kecil dan menengah harus melakukan pembenahan diri dengan berorientasi pada pengkajian peluang dan tantangan yang berbasis teknologi agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*) bagi perekonomian negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam membina pertumbuhan dan perkembangan industri dan usaha kecil dan menengah, dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui (a) pengembangan iklim usaha, (b) pemberian bantuan teknis, bantuan modal dan prasarana/sarana penunjang, (c) pemberdayaan SDM (pendidikan dan pelatihan), (d) kelembagaan, (e) kegiatan lain berupa kajian/studi, forum kerjasama internasional, workshop, seminar, dan lain-lain. Pembinaan dilakukan berbagai instansi pembina di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) melalui Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah (IDKM), Badan Pusat Ekspor Nasional (BPEN) di tingkat Pusat dan di daerah dilakukan oleh Dinas Pembina Industri dan Perdagangan di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu pembinaan juga dilakukan secara lintas sektoral bekerja sama dengan berbagai instansi pembina di lingkungan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, dan lain-lain. Namun berbagai upaya pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pengusaha selama ini.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah-masalah yang ingin dijawab dalam penelitian (*research question*) ini adalah :

1. Apa permasalahan utama yang menghambat keberhasilan upaya pembinaan industri kecil dan menengah selama ini ?
2. Bagaimanakah usulan strategi dan kebijakan bagi pengembangan industri kecil dan menengah, khususnya industri logam di masa mendatang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perkembangan positif perekonomian dunia yang melahirkan kebijaksanaan perdagangan bebas khususnya di Asia Tenggara (AFTA), studi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam penyusunan strategi yang kompetitif sehingga dapat mewujudkan *national public policy*.

Selain itu penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kondisi IKM saat ini, mempelajari kebijakan pengembangannya dalam menghadapi era pasar bebas. Serta menganalisis dan evaluasi atas langkah kebijakan pembinaan yang telah dilakukan dalam pengembangan industri kecil dan menengah khususnya IKM logam.
2. Menyusun rumusan alternatif strategi kebijakan dan pola/model pembinaan yang diperlukan.

1.4 Batasan Masalah

Seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama yang muncul adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di kancah globalisasi dan liberalisasi sehingga mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*) suatu negara yang mengarah kepada *international competitiveness*.

Dalam melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan IKM, terdapat beberapa batasan masalah yang menjadi bahan pertimbangan penulis yaitu konsep pengembangan didasarkan pada indikator-indikator pengembangan berbasis teknologi (*technology-based development*).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pentingnya peranan teknologi dalam pembangunan suatu bangsa telah diakui secara luas, terutama oleh bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan di tingkat dunia internasional seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang (Hadi Prayitno dan Budi Santosa, 1996:176). Teknologi telah diaplikasikan sebagai variabel strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun mempercepat proses perubahan sosial.

Apabila ditelusuri jauh ke belakang, proses pembangunan nasional di Indonesia memang lebih banyak dikerangkakan dengan dimensi ekonomi ketimbang dimensi teknologi. Hingga kini indikator keberhasilan pembangunan masih didasarkan pada ukuran-ukuran atau besaran-besaran ekonomimakro, yang tidak lain merupakan indikator-indikator dari konsep pengembangan wilayah yang konvensional. Misalnya Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, pengeluaran pembangunan, inflasi, kurs, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, keseimbangan transaksi berjalan, dan lain-lain.

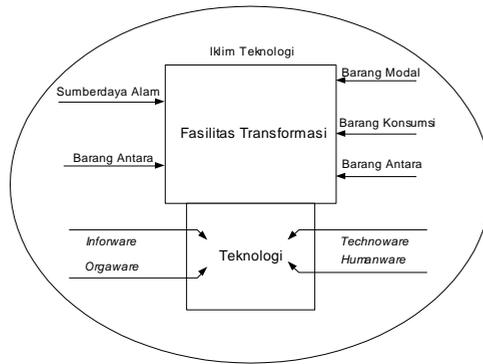
Kenyataan selama puluhan tahun ke belakang di atas telah cukup bagi bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji ulang konsep pembangunan berbasis ekonomimakro (*macroeconomic based development*) untuk kemudian dikombinasikan atau dipadukan dengan konsep pembangunan berbasis teknologi (*technology based development*).

Dalam konsep *technology based development*, ada tiga elemen yang terlibat dalam suatu aktivitas transformasi, yaitu :

1. Input, yang terdiri dari sumberdaya alam atau *natureware* (seperti sumberdaya geofisik, sumberdaya mineral, dan sumberdaya hayati) dan barang antara atau *semiware* (seperti bahan-bahan kimia).
2. Output, baik berupa barang-barang konsumsi atau *consumware* (seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan alat-atat rumah tangga), barang-barang antara, dan barang peralatan atau *technoware* (seperti peralatan, mesin, pabrik, perlengkapan, dan kendaraan bermotor).

3. Teknologi, yang berfungsi sebagai, pentransformasi input menjadi output berdasarkan empat komponen yang dimilikinya (*technoware, humanware, inforware, dan orgaware*).

Hubungan di antara ketiga elemen di atas untuk level perusahaan (*firm*) dapat diilustrasikan sebagaimana tampak pada Gambar 1 (ESCAP, 1989 : Vol 2 : 45; ADB, 1995:24).



Gambar 1. Proses Transformasi Produksi

Salah satu alat analisis yang memainkan peranan penting dalam penerapan konsep *technology-based development* untuk menciptakan keunggulan daya saing wilayah adalah Penilaian Kandungan Teknologi (*Technology Content Assessment*).

Technology Content Assessment merupakan analisis kinerja kontribusi komponen teknologi dalam proses transformasi input menjadi output di suatu wilayah, tepatnya pada level perusahaan. Analisis pada *framework* ini diperoleh hasil berupa koefisien kontribusi teknologi (TCC), yang menunjukkan tinggi rendahnya kinerja kemutakhiran (*state-of-the-art*) teknologi dalam proses transformasi di wilayah tersebut. Selanjutnya dapat pula dihitung nilai tambah kandungan teknologi (TCA) – dalam pendekatan teknometrik, yang identik dengan PDB yang selama ini dijadikan indikator utama untuk melihat kemajuan pembangunan. Kegunaannya adalah untuk menilai kinerja tingkat pengembangan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemasyarakatan teknologi suatu wilayah. Berdasarkan kinerja yang diperoleh, dapat dirumuskan secara lebih terarah upaya-upaya perbaikan yang perlu ditempuh guna meningkatkan kinerja proses

transformasi sumberdaya di wilayah yang bersangkutan. Dari hasil ini analisis dapat menarik 2 implikasi utama ; 1) hasil analisis dapat dijadikan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan, 2) hasil analisis dapat dijadikan sebagai alat dalam memformulasikan kebijakan dan strategi untuk menciptakan keunggulan daya saing wilayah yang berkesinambungan (ESCAP 1989 (Vol 2).

2.2 Kebijakan Industri dan Analisis Kebijakan

Kebijakan didefinisikan sebagai suatu daftar tujuan cita-cita (*goals*) yang memiliki urutan prioritas atau pernyataan umum tentang maksud dan tujuan (Starling, 1998). Menurut Pal (1997), kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sekelompok masalah yang kompleks. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan (*action*) atau diamnya (*in-action*) otoritas publik (pemerintah) untuk memecahkan suatu masalah (Pal, 1997).

Pada sub-sub bab ini akan dikemukakan beberapa literatur yang akan memberikan gambaran tentang definisi dari kebijakan industri dan analisis kebijakan.

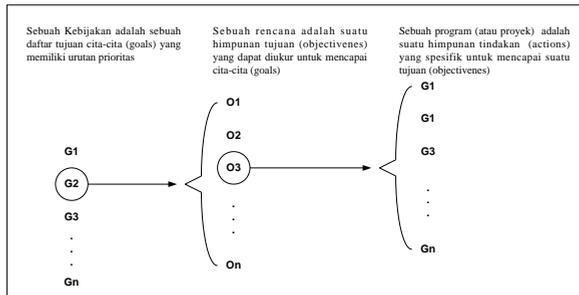
2.2.1 Kebijakan Industri

Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumberdaya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu (dan, jika diperlukan untuk perusahaan tertentu) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas faktor masukan adalah salah satu bentuk regulasi pemerintah untuk mencapai kebijakan makroekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor industri atau perusahaan tersebut.

2.2.2 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan meliputi; konflik kebijakan-kebijakan, konsistensi internal, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, konsekuensi politis, masalah-masalah dalam implementasi, penentuan prioritas, jadwal pelaksanaan program, dan evaluasi. Analisis kebijakan mencoba memberikan informasi tentang konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan (*action*) yang diusulkan (Starling, 1988).

Starling (1988) memberikan pula definisi rencana dan program. Rencana (*plan*) didefinisikan sebagai suatu himpunan tujuan (*objectives*) yang dapat diukur untuk mencapai suatu cita-cita (*goals*). Sebuah program (atau proyek) merupakan suatu himpunan tindakan (*actions*) yang spesifik untuk mencapai suatu tujuan (*objectives*). Kaitan antara kebijakan, rencana, dan program dinyatakan oleh Starling sebagai berikut :



Gambar 2. Kaitan antara Kebijakan, Rencana, dan Program

2.2.2.1 Pengertian Analisis Kebijakan

Beberapa definisi mengenai analisis kebijakan; 1) menurut Weimer dan Vining (1989), analisis kebijakan adalah “suatu anjuran (*advice*) yang berorientasi kepada klien dan berkaitan dengan keputusan publik”; 2) menurut Williams (1971) mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu cara untuk menggabungkan informasi-termasuk berbagai hasil penelitian-kedalam suatu format yang sesuai untuk keputusan kebijakan (analisis kebijakan akan memaparkan pilihan-pilihan kebijakan) serta menentukan informasi yang dibutuhkan di masa depan untuk membuat kebijakan”; 3) Dunn (yang dikutip dalam Weimer dan Vining, 1989) menekankan bahwa analisis kebijakan merupakan “suatu disiplin ilmu sosial yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang terkait dengan kebijakan yang dapat digunakan dalam suatu lingkungan politik untuk menyelesaikan masalah kebijakan”. Jadi tujuan utama dalam analisis kebijakan adalah menganalisis dan menyajikan alternatif yang tersedia melalui sintesa riset dan teori-teori yang ada dalam menyelesaikan masalah publik.

2.2.2.2 Faktor-faktor Penting dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Starling (1988) menyatakan bahwa faktor-faktor penting dari proses pembuatan kebijakan terdiri dari identifikasi masalah, formulasi usulan kebijakan adopsi, operasi/implementasi program, dan evaluasi, sebagaimana yang terdapat pada Gambar 3.

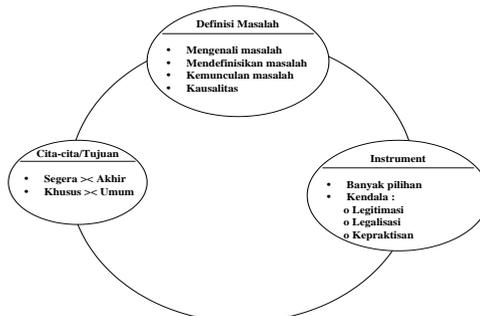


Gambar 3. Faktor-faktor dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Gambar di atas menjelaskan bahwa identifikasi beberapa masalah atau peluang (*opportunity*) akan mengarah pada formulasi sebuah kebijakan. Usulan kebijakan berisi penjelasan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah atau bagaimana menggunakan peluang yang ada.

Secara ideal, usulan kebijakan terdiri dari sebuah daftar tujuan utama (*goal*) berdasarkan prioritas dan sebuah pernyataan mengenai alternatif-alternatif (atau program-program) untuk mencapai tujuan utama. Selanjutnya usulan kebijakan harus diadopsi atau dilegitimasi. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi, masalah birokrasi sudah mulai mendominasi (Starling 1988).

Pal (1997) menyatakan bahwa setiap kebijakan memiliki tiga elemen utama, yakni definisi masalah, cita-cita (tujuan) yang harus dicapai, dan instrumen atau cara menghadapi masalah dan mencapai tujuan. Elemen-elemen dari isi (*content*) kebijakan ditunjukkan oleh Gambar 4.

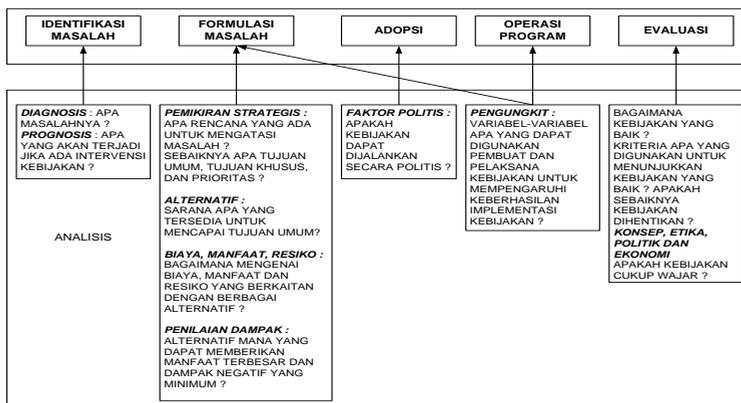


Gambar 4. Elemen-elemen Kebijakan

Pal (1997) menghubungkan ketiga elemen kebijakan dalam sebuah *loop* (Gambar 4). *Loop* tersebut menyatakan perlunya konsistensi diantara ketiga elemen kebijakan. Pendefinisian sebuah masalah harus sesuai dengan tujuan dan instrument.

2.2.2.2 Hubungan antara Pembuatan Kebijakan dengan Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan tidak dapat dimengerti sepenuhnya tanpa pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan. Straling memberikan sebuah kerangka/model tentang hubungan antara pembuatan kebijakan dengan analisis kebijakan (Gambar 5). Kerangka tersebut menunjukkan hal-hal khusus di dalam proses pembuatan kebijakan di mana berbagai konsep analitis, proporsi, dan teknik dapat memberikan arahan bagi pemikiran, pemilihan, serta perilaku administratif dari pembuat kebijakan.



Gambar 5 Hubungan antara Analisis dan Proses Pembuatan Kebijakan

1) Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dilakukan dalam pendefinisian masalah adalah sebagai berikut (Starling, 1988) :

- Identifikasi kebutuhan khusus yang akan diwujudkan serta besarnya
- Identifikasi sumber-sumber penyebab masalah

Sebuah masalah merupakan perbedaan substansial antara apa yang ada dan apa yang seharusnya (Pal, 1997). Ia menguraikan beberapa hal penting mengenai masalah, yaitu :

- Masalah harus dikenali dan didefinisikan
- Proses pendefinisian masalah dapat bersifat mendalam/lengkap atau sederhana
- Masalah biasanya terdapat dalam kelompok-kelompok sehingga definisi masalah dapat berkaitan dengan beberapa dimensi.
- Masalah kadang nampak secara substansial dalam perubahan konteks atau situasi, seperti berubahnya keadaan atau munculnya peluang baru.
- Definisi masalah mempunyai sifat sederhana, yaitu dapat mengindikasikan masalah atau isu, dan sekumpulan indikasi mengenai faktor-faktor penyebabnya.

2) Formulasi Kebijakan

Analisis pada tahap formulasi kebijakan diarahkan untuk membuat:

- Identifikasi tujuan (cita-cita) utama serta bagaimana tujuan-tujuan tersebut terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan.
- Identifikasi alternatif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- Evaluasi alternatif-alternatif dari sisi manfaat dan biaya

Rancangan kebijakan (*policy design*) berkaitan dengan pemilihan kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kriteria kunci dalam pemilihan kebijakan adalah efektivitas sedangkan kriteria lainnya adalah efisiensi (Pal, 1997).

Kebijakan merupakan cara menghadapi masalah dan mencapai tujuan. Isu pertama mengenai kebijakan berkaitan dengan siapa yang akan melakukan dan bagaimana caranya. Isu kedua berkaitan dengan implementasi. Pada dasarnya, pemerintah memiliki berbagai kebijakan yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan kebijakan (Pal, 1997).

3) Adopsi

Pada tahap ini diperlukan penerimaan dan pemberian kekuatan hukum agar kebijakan yang dipilih memiliki legitimasi. Menurut

Straling (1988), terdapat beberapa sarana atau instrumen untuk memberikan legitimasi, yaitu : hukum/aturan, politik (dalam bentuk dukungan formal atau informal), prosedur administrasi, dan pengaturan keuangan (*financial arrangements*)

4) Implementasi

Pada tahap implementasi, berbagai tindakan (*actions*) dilakukan oleh individu-individu atau organisasi-organisasi pada waktu dan tempat tertentu untuk mencapai berbagai tujuan.

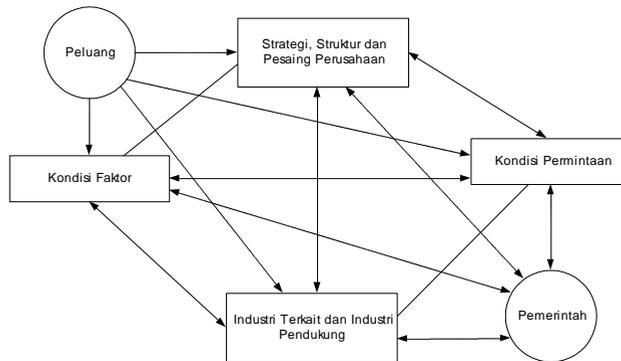
Dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kegagalan implementasi, yaitu :

- Hasil kebijakan (*policy outcomes*) tidak sesuai dengan tujuan atau harapan.
- Pemerintah atau instansi lain gagal untuk mengenali suatu masalah atau mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Dengan perkataan lain, terjadi kekurangan kebijakan, atau tujuan kurang sesuai terhadap kebutuhan).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu kemudahan masalah untuk dipecahkan, kejelasan tujuan, komitmen, ketersediaan sarana, akses pada informasi, asumsi-asumsi tentang hubungan sebab-akibat, dinamika penegakan (*enforcement*), budaya, birokrasi, kepemimpinan, dan korupsi (Yudoko, 2000).

2.3. Faktor-faktor Penentu Keunggulan Daya Saing Wilayah

Porter (1990:71) menjelaskan bahwa keunggulan daya saing suatu negara ditentukan oleh empat faktor pokok, yaitu kondisi faktor produksi (*faktor conditions*), kondisi permintaan (*demand conditions*), industri-industri pendukung dan industri terkait, serta strategi, struktur, dan persaingan antarwilayah. Di samping keempat faktor pokok ini, masih ada dua faktor penunjang yang juga mempengaruhi keunggulan daya saing suatu wilayah, yaitu peluang (*chance*) dan peranan pemerintah (*role of government*) (lihat Gambar 6.).



Gambar 6. Sistem Lengkap Keunggulan Daya Saing Wilayah

Peranan keenam faktor penentu keunggulan daya saing wilayah di atas dapat diuraikan secara singkat seperti di bawah ini.

Kondisi Faktor Produksi

Faktor-faktor produksi yang sangat diperlukan dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah antara lain berupa ketersediaan lahan, sumberdaya alam, modal, tenaga kerja yang ahli, dan infrastruktur.

a. Faktor *endowment* terbagi atas beberapa sumberdaya :

- Sumberdaya manusia, dengan berbagai indikator seperti kuantitas, keahlian, gaji personal, perhitungan standar jam kerja, dan etika kerja. Sumberdaya manusia dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti *toolmakers*, sarjana, doktor, *programmer*, dan sebagainya.
- Sumberdaya fisik, dengan indikator-indikator kuantitas, kualitas, aksesibilitas perolehan, harga tanah, air, mineral, sumberdaya listrik, perikanan, serta iklim, lokasi, dan ukuran geografis.
- Sumberdaya pengetahuan, yang diindikasikan oleh jumlah ilmuwan, teknokrat, dan pengetahuan pasar terhadap produk dan jasa. Sumberdaya pengetahuan ini berada di perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, badan statistik pemerintah, literatur bisnis dan pengetahuan, laporan riset pasar dan *database*, asosiasi perdagangan, dan berbagai sumber lainnya.

- Sumberdaya kapital. Indikatornya berupa jumlah dan besarnya investasi yang disediakan untuk mendukung produk-produk unggulan suatu wilayah. Kapital dan investasi ini tidak homogen, tetapi bervariasi dalam bentuk pinjaman, surat berharga, ekuitas, dan modal.
- Infrastruktur wilayah, dengan indikator seperti tipe, kualitas, dan biaya penggunaan infrastruktur yang mempengaruhi persaingan antarwilayah, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem pembayaran atau transfer dana.

b. Hirarki faktor-faktor produksi.

Untuk memahami peranan faktor-faktor produksi di atas dalam menciptakan keunggulan daya saing suatu wilayah, maka faktor-faktor tersebut perlu dipilah menjadi *basic factors* dan *advanced factors*. Faktor yang pertama meliputi sumberdaya alam, iklim, lokasi, tenaga kerja tak terdidik dan semi terdidik, serta hutang kapital. Sedangkan faktor kedua lebih merupakan faktor yang sengaja diciptakan meliputi jaringan infrastruktur, data komunikasi digital modern, personil berpendidikan tinggi, serta lembaga riset perguruan tinggi yang terpercaya.

c. Kreasi faktor.

Kreasi faktor (*faktor creation*) merupakan hasil yang diciptakan melalui investasi, bukan diwariskan. Mekanisme kreasi faktor meliputi lembaga pendidikan umum dan swasta, program-program pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penelitian pemerintah dan swasta. Dengan standar kelas dunia yang meningkat, berarti untuk mencapai keunggulan daya saing suatu wilayah *faktor creation* tidak hanya membutuhkan satu kali investasi, melainkan terus menerus untuk meningkatkan mutu. Untuk menciptakan keunggulan daya saing wilayah, mekanisme kreasi faktor lebih penting dibandingkan faktor-faktor yang diwariskan (*basic factors*).

Negara yang sukses dalam industrinya adalah negara yang mampu menciptakan dan mengembangkan *faktor creation* yang dibutuhkan. Negara akan memiliki keunggulan daya saing jika mekanisme kelembagaan dengan kualitas sangat tinggi dapat menciptakan faktor yang terspesialisasi. Namun perlu diingat, bahwa investasi pada penelitian dasar (*basic research*) tidak akan

mengarah pada keunggulan daya saing kecuali bila ditransformasikan untuk pengembangan lebih lanjut oleh industri dalam bentuk investasi langsung yang signifikan.

Tidak ada satupun negara yang dapat menciptakan dan mengembangkan semua tipe dan jenis faktor. Tipe dan faktor mana saja yang akan diciptakan dan dikembangkan serta seberapa besar efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai penentu (*determinants*). Antara lain kondisi permintaan lokal, keberadaan industri pendukung dan industri terkait, tujuan perusahaan, dan karakteristik persaingan domestik. Bahkan investasi langsung oleh pemerintah juga dipengaruhi oleh berbagai penentu lainnya. Keberadaan *advanced factors* dan faktor yang terspesialisasi dalam suatu negara seringkali tidak hanya merupakan faktor penyebab keunggulan nasional, melainkan juga merupakan akibat dari keunggulan nasional.

d. Seleksi kelemahan-kelemahan faktor produksi.

Lahirnya keunggulan daya saing wilayah bisa juga berasal dari kelemahan dalam beberapa faktor produksi. Dalam persaingan aktual, tinggi atau rendahnya biaya dari suatu faktor produksi seringkali mengarah kepada ketidakefisienan. Sebaliknya, kelemahan dalam faktor-faktor produksi dasar seperti kekurangan tenaga kerja, langkanya sumberdaya alam, atau iklim yang keras, umumnya justru mendorong adanya inovasi.

Kelemahan faktor-faktor produksi yang dapat merangsang inovasi harus diseleksi, sehingga bisa efektif untuk memicu motivasi, bukannya malah mematahkan semangat. Tekanan yang terlalu kecil kurang efektif untuk memicu kemajuan, tapi malah mengarah kepada ketidakmampuan untuk bergerak. Tingkat tekanan yang sedang, yang menyeimbangkan antara keunggulan pada beberapa area lainnya, tampaknya merupakan kombinasi terbaik untuk inovasi dan pembaharuan.

Kondisi Permintaan

Ada tiga karakteristik kondisi permintaan yang penting dalam menciptakan keunggulan daya saing wilayah, yaitu :

a. Komposisi permintaan dalam negeri, yang mencakup :

- Struktur segmen permintaan (distribusi permintaan untuk jenis tertentu).
 - Pembeli menuntut kepuasan yang tinggi.
 - Antisipasi kebutuhan pembeli.
- b. Ukuran dan pola pertumbuhan domestik, yang meliputi :
- Ukuran permintaan domestik.
 - Jumlah pembeli bebas.
 - Laju pertumbuhan permintaan domestik.
 - Permintaan awal domestik.
 - Titik jenuh awal.
- c. Internasionalisasi dari permintaan domestik.

Komposisi permintaan domestik merupakan akar keunggulan suatu wilayah, sementara ukuran dan pola pertumbuhan permintaannya dapat memperkuat keunggulan dengan cara mempengaruhi perilaku investasi, waktu, dan motivasi, atau melalui mekanisme internasionalisasi permintaan domestik dan mendorong produk dan jasa nasional ke luar negeri.

- *Mobile* atau *multinational local buyers*
- Pengaruh kebutuhan asing

Industri-industri Pendukung dan Industri Terkait

Keunggulan daya saing dalam industri-industri pemasok memberikan keunggulan yang potensial bagi industri-industri dalam suatu wilayah, karena industri pemasok seperti itu memproduksi input yang digunakan secara luas dan penting bagi inovasi dan internasionalisasi.

- a. Keunggulan daya saing industri pemasok
- b. Keunggulan daya saing dalam industri terkait.

Strategi Perusahaan, Struktur, dan Persaingan

- a. Strategi dan struktur perusahaan domestik
- b. Tujuan perusahaan dan individu
 - Tujuan perusahaan
 - Tujuan Individu
- c. Persaingan domestik

Peran Kejadian yang Tidak Dapat Dikontrol

Faktor-faktor penentu keunggulan daya saing suatu wilayah akan membentuk sebuah sistem atau lingkungan tertentu. Lingkungan atau sistem yang telah terbentuk dapat terganggu oleh apa yang disebut *chance* yang terjadi begitu saja. Beberapa contoh *chance* yang penting adalah :

- Tindakan penemuan.
- Perubahan besar dalam penemuan teknologi (seperti bioteknologi, mikroelektronik).
- Perubahan dalam biaya input.
- Pertambahan permintaan dunia maupun regional yang cukup besar
- Perubahan kebijaksanaan politik negara lain
- Perang, bencana alam, dan lain-lain.

Peran pemerintah

Pada dasarnya pemerintah tidak berperan sebagai faktor penentu bagi keunggulan daya saing suatu wilayah. Peran pemerintah hanya sebatas mempengaruhi kondisi faktor, kondisi permintaan (melalui kebijaksanaan moneter dan keuangan), serta mengatur perdagangan. Dengan kata lain, pemerintah tidak dapat menciptakan keunggulan daya saing. Peran pemerintah adalah sebatas memperbaiki atau menurunkan keunggulan daya saing tersebut. Pengaruh yang dapat diberikan pemerintah terhadap keempat faktor penentu keunggulan daya saing adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi faktor dipengaruhi melalui subsidi, kebijakan pasar modal, kebijakan pendidikan, dan sebagainya.
- b. Kondisi permintaan dipengaruhi melalui penentuan standar produk unggulan lokal yang mempengaruhi kebutuhan pembeli, termasuk pemerintah yang juga merupakan pembeli beberapa produk domestik.
- c. Industri-industri pendukung dan industri terkait dalam suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh pemerintah dengan cara mengontrol media periklanan atau regulasi.
- d. Strategi perusahaan, struktur, dan persaingannya dipengaruhi oleh pemerintah melalui berbagai perangkat seperti regulasi pasar modal, kebijakan pajak, dan *antitrust*.

3. Pembahasan

3.1 Pengembangan IKM di Indonesia

Definisi industri kecil dan menengah, menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, definisi usaha kecil termasuk industri dan dagang kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
- b. Sesuai dengan Inpres No. 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah menyebutkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)

Pembinaan dan pengembangan IKM di Indonesia tentunya didasarkan pada definisi tersebut diatas dengan tujuan agar terwujudnya ; kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, struktur industri yang kuat ditandai dengan meningkatnya keterkaitan antara industri kecil, menengah dan besar, upaya pelestarian seni/budaya, sistem distribusi barang dan jasa yang efisien, pembangunan di setiap daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di setiap daerah, serta meningkatnya pemsaran dalam negeri dan ekspor.

3.2 Pengembangan IKM di Negara Lain

Pengembangan IKM di negara lain dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam memproyeksikan arah perkembangan industri kecil dan mengevaluasi keefektifan kebijakan pengembangan industri kecil.

1. Peran IKM dalam perekonomian

Perusahaan manufaktur kecil (tenaga kerja < 10 orang) praktis sudah hilang di Eropa dan Amerika Utara, tetapi perusahaan

manufaktur dengan tenaga kerja antara 50-99 orang masih tetap bertahan. Di Taiwan IK dengan tenaga kerja kurang dari 50 orang semakin menurun perannya dalam penyerapan tenaga kerja, perusahaan ukuran 50-99 perannya relatif konstan, dan ukuran yang lebih besar meningkat dengan pesat. Di Filipina peran IKR menurun secara relatif meskipun penyerapan tenaga kerja secara absolut masih bertambah. Di India peran IKR menurun secara relatif, sedangkan IK dengan tenaga kerja 10-99 orang meningkat (Little et al., 1987).

2. Hubungan subkontrak antara IB dengan IKM

Di Jepang terdapat tradisi kerjasama subkontrak antara IB dengan IK. Sebanyak 65% perusahaan kecil dan menengah melakukan hubungan subkontrak dan 82% diantaranya mengkhuskan diri hanya melayani pekerjaan subkontrak. Korea Selatan mendorong terjadinya subkontrak dengan memberikan insentif fiskal dan keuangan.

Taiwan juga secara aktif mempromosikan hubungan subkontrak yaitu melalui penciptaan subkontraktor lokal yang efisien, antara lain dengan penyebarluasan informasi teknologi serta pemberian bantuan manajemen, keuangan, dan teknis. Subkontraktor di Taiwan saling bersaing untuk mendapatkan kontrak dengan principal.

Malaysia mengembangkan sistem subkontraktor melalui kerjasama dengan perusahaan multi-nasional yang melakukan reduksi ongkos dan menjalankan strategi globalisasi melalui investasi dalam *ancillary industries*. Hal yang sama terjadi secara lebih ekstensif di Singapura. Rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja IK di Thailand menyebabkan hubungan subkontrak dengan IK kurang berhasil (Meyanathan, 1994).

3. Pergeseran Keunggulan IKM

Beberapa jenis IK berkurang perannya selama pertumbuhan industri yang cepat di Korea Selatan karena membesarnya pasar domestik dan perbaikan infrastruktur menyebabkan berkurangnya keunggulan lokasi perusahaan kecil (Ho, dikutip dalam Cortez et al., 1987).

4. Bantuan teknik bagi IKM

Di Jepang bantuan teknologi diberikan antara lain berupa informasi yang disediakan melalui lembaga pendukung pada tingkat provinsi

dan kunjungan oleh ahli ke IK, subsidi teknologi baru, subsidi proyek R&D yang dapat digunakan oleh UKM, dan program pelatihan bagi para insinyur dan teknisi yang bekerja di UKM (Nagaoka, 1989).

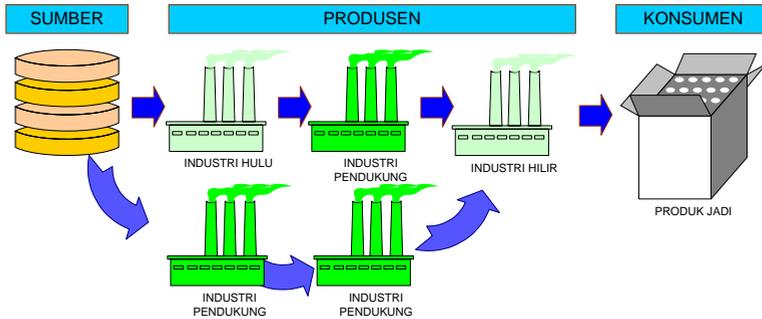
5. Selektivitas dalam bantuan pengembangan IKM
Di Malaysia bantuan pengembangan IK hanya diberikan bagi IK yang menghasilkan komoditas yang unggul. Di Thailand pengembangan IK disatukan dengan pengembangan wilayah, sehingga pengembangan IK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah (LPM ITB, 1996b).
6. Manfaat sosial pengembangan IKM
Penelitian di India menunjukkan pengembangan IK dengan tujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja ternyata dapat memakan biaya yang sangat tinggi, penggunaan teknologi dan produk madya (*intermediate*) tidak selalu memberi manfaat sosial yang diinginkan (Little et al., 1987).
7. Proteksi bagi IKM
Studi di India menunjukkan bahwa kebijakan proteksi (pengkhususan komoditas) bagi IK malah menimbulkan kerugian yang serius berupa hambatan bagi perusahaan kecil untuk tumbuh (Little et al., 1987).
8. Efektivitas bantuan pemerintah
Penelitian di Columbia menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong kewirausahaan, memperbaiki akses modal, menyediakan pelatihan dan memberi bantuan teknis akan efektif bagi pengembangan IK, apabila IK berada di dalam lingkungan ekonomi yang tumbuh dan permintaan yang meningkat (Cortez et al., 1987).

3.3 Keterkaitan Industri

Porter (1990 : 71) menjelaskan bahwa keunggulan daya saing dalam industri-industri pendukung memberikan keunggulan yang potensial bagi industri-industri dalam suatu wilayah, karena industri pemasok seperti itu memproduksi input yang digunakan secara luas dan penting bagi inovasi dan internasionalisasi.

Industri pendukung adalah industri yang membuat barang/jasa bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri akan tetapi dijual ke pasar bebas atau industri lain dengan tujuan untuk mendukung produk akhirnya agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Keterkaitan industri pendukung dalam membantu industri hilir dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7. Keterkaitan Industri Pemasok

Industri pendukung yang memiliki keunggulan daya saing adalah industri yang memiliki penguasaan manajemen dan teknologi yang lebih baik, cepat tanggap terhadap permintaan pasar serta mampu membuat rencana proses dan produksi yang akurat.

Nu'man (2004) dalam penelitiannya menganalisis kondisi IKM dengan pendekatan teknologi menunjukkan bahwa kontribusi komponen *Technoware* IKM sebesar 0,325, yang memberikan arti bahwa fasilitas pendukung dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan hanya sekitar 32,5%.

Kontribusi komponen *Humanware* IKM sebesar 0,2, yang memberikan arti bahwa kemampuan pekerja dalam proses produksi hanya sekitar 20%. Kontribusi komponen *Infoware* IKM sebesar 0,25, yang memberikan arti bahwa informasi yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan fasilitas yang ada dalam proses produksi hanya sekitar 25%. Kontribusi komponen *Orgaware* IKM sebesar 0,3, yang memberikan arti bahwa organisasi yang terdapat pada IKM, baik dari sisi pemilik, modal, maupun tenaga kerja hanya sekitar 30%.

Nilai intensitas kontribusi komponen teknologi (β) digunakan untuk menyusun prioritas dalam upaya peningkatan kemampuan teknologi, yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan *software expert choice* atas nilai perbandingan berpasangan antara keempat komponen teknologi yang terjadi pada IKM.

Apabila sumberdaya dialokasikan kepada komponen teknologi yang memiliki nilai β paling tinggi, maka nilai *Total Contribution Component* (TCC) – yang menunjukkan tambahan kandungan teknologi dari hasil kontribusi ke-empat komponen teknologi – akan mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi akibat pengalokasian terhadap komponen yang nilai β -nya lebih rendah.

Berdasarkan pada matriks tingkat kepentingan maka hasil perhitungan dengan menggunakan *software expert choice* atas nilai perbandingan berpasangan untuk menghasilkan nilai intensitas kontribusi (β) setiap komponen teknologi adalah sebagai berikut ; intensitas kontribusi *technoware* (β_T) = 0,53 ; intensitas kontribusi *humanware* (β_H) = 0,27 ; intensitas kontribusi *infoware* (β_I) = 0,12 ; intensitas kontribusi *orgaware* (β_O) = 0,08.

Dari hasil pembobotan intensitas kontribusi komponen teknologi seperti tersebut, dapat dikatakan bahwa pengalokasian sumberdaya terhadap komponen teknologi *technoware* (memiliki nilai β yang paling tinggi) akan menciptakan kenaikan tertinggi terhadap nilai TCC.

Koefisien kontribusi komponen teknologi (TCC) diperoleh dari hasil pembobotan kecanggihan teknologi dan penilaian *state of the art*. Hasil yang diperoleh Koefisien kontribusi komponen teknologi (TCC) pada IKM adalah sebesar 0,53.

3.4 Kebijakan Strategis Pengembangan IKM

Berdasarkan pada uraian di atas, maka perlu upaya yang sangat komprehensif dalam merumuskan kebijakan pengembangan IKM di masa yang akan datang. Dari hasil analisis kandungan teknologi menunjukkan bahwa nilai kontribusi untuk masing-masing komponen, menghasilkan total kontribusi kandungan teknologi sebesar 0,53.

penyediaan pengusaha dan manajer yang baik, peningkatan pendapatan masyarakat, pendistribusian kepemilikan dan pendapatan yang lebih merata yang akhirnya akan menciptakan peningkatan produk nasional.

Dengan demikian maka diperlukan satu target yang lebih tegas dan spesifik bagi pengembangan IKM. Target ini seyogyanya tetap melayani target pembangunan karena kebijakan IKM adalah bagian dari kebijakan industri, sedangkan kebijakan industri adalah bagian dari kebijakan pembangunan. Target pengembangan IKM yang dianggap paling tepat adalah menciptakan industri kecil yang tangguh dan mandiri, yaitu industri yang mampu tumbuh, beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang dengan kemampuannya sendiri. Untuk itu maka model konseptual pengembangan IKM yang memiliki daya saing di era global dapat diilustrasikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Kebijakan Pengembangan IKM

Pada model konseptual kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah yang tangguh, kooperatif, dan mandiri akan berhasil apabila didukung oleh keempat komponen teknologi yang mempunyai ruang untuk diintensifkan. Pada ruang yang berwarna lebih gelap menunjukkan elemen yang paling mendesak untuk segera diperbaiki dibandingkan ruang komponen lainnya, yaitu komponen *technoware* yang didukung oleh institusi terkait dalam penguatan teknologi

dengan melakukan riset dan pengembangan teknologi bagi industri kecil menengah.

Suatu rantai nilai tidak berfungsi secara optimal jika terjadi pemutusan pada sistemnya. Dalam konsep pengembangan industri kecil dan menengah, diperoleh bahwa industri kecil dan menengah, industri terkait serta pendukungnya tidak dapat menarik dan meneruskan rantai secara maksimal sehingga hal ini akan menjadi hambatan bagi keberlangsungan dan tumbuh-kembangnya anak-anak rantai yang lain. Sehingga ruang intensif yang diperlukan adalah dibentuknya kebijakan tentang investasi, teknologi, informasi, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Sementara akses pasar dan permodalan diperlukan untuk menjawab kondisi faktor yang ada dengan harapan faktor-faktor pembentuk daya saing memiliki kondisi yang positif, stabil dan berpeluang untuk terus berkembang sesuai zaman. Deregulasi yang dilakukan perlu memperhatikan kondisi ketiga faktor lainnya sehingga perluasan ruang intensifnya menjadi bermanfaat.

Ruang intensif akses pasar dan permodalan diupayakan untuk memperbaiki struktur pasar dan pengembangan teknologi yang dapat dilakukan bersama-sama sebagai strategi dalam meningkatkan kondisi faktor dan kondisi permintaan yang terjadi. Sehingga diferensiasi produk bisa berkembang lebih luas lagi tergantung kondisi permintaan. Diferensiasi yang dilakukan baik pada produk maupun harga juga merupakan implementasi dari faktor strategi perusahaan dan industri terkait dan pendukung. Sehingga jika diamati perkembangan model konseptual tersebut bukan bergerak seperti roda namun berpondasi, bersumber pada satu titik tujuan yang direfleksikan melalui jari-jari ruang intensif dengan daya dukung dari semua institusi terkait.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, maka kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah, sebagai upaya untuk peningkatan daya saing di era perdagangan bebas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang ada pada industri kecil dan menengah pada umumnya memiliki derajat kecanggihan setiap komponen teknologi (*technoware*, *humanware*, *inforware*, *orgaware*, yang relatif rendah rendah. Dengan demikian, maka perspektif teknologi IKM memiliki kemampuan teknologi relatif rendah.
2. Pengembangan industri kecil menengah bertujuan untuk menumbuhkembangkan industri tersebut sehingga mampu memperkuat struktur industri yang ada dan menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat untuk pengembangan industri kecil agar dapat mampu bersaing secara kompetitif terhadap ke-empat komponen teknologi tersebut antara lain kebijakan tentang pengembangan penguatan teknologi pada IKM agar memiliki daya saing di era global, dengan urutan prioritas pada komponen *Technoware* (32,5%), *Orgaware* (30%), *Inforware* 25%, serta *Humanware* (20%). Kebijakan Pemerintah dalam melakukan Program pembinaan pada setiap institusi terkait perlu ditinjau kembali dan perlu dievaluasi.

4.2 Saran-saran

1. Diperlukan penelitian-penelitian lain yang sejenis pada industri-industri lain, sehingga akan didapatkan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang ada pada masing-masing industri.
 2. Diperlukan penelitian lanjutan dari hasil penelitian pada seluruh industri tersebut diatas untuk mendapatkan suatu kerangka kebijakan umum industri kecil yang mencakup keseluruhan permasalahan yang ada.
 3. Diperlukan penelitian lanjutan tentang pengaruh kebijakan makro pemerintah terhadap industri untuk masing-masing industri kecil.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Buku Panduan Sistem Informasi Penguatan Teknologi dan Manajemen (SIPTekMan) Bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Deputi Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK BPPT.
- 2002. *Rencana Induk Pengembangan IKM : Buku I Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah*. Jakarta : Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- 2003., *Rencana Induk Pengembangan IKM : Buku II Program Pengembangan Industri Kecil Menengah*, Jakarta : Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP)*, 1989, Volume 1, “*An Overview of the Framework*”, APCTT, Bengalore.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP)*, 1989, Volume 2, “*Technology Content Assesment*”, APCTT, Bengalore.
- Kotler, Philip. 1997. *The Marketing of Nations : A Strategic Approach to Building National Wealth*. Free Press A Division of Macmillan, Inc., New York.
- Nu'man, A. Harits. 2004. “Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah Sebagai Suatu Strategi Peningkatan Daya Saing di Era Perdagangan Bebas”, *Thesis*. Bandung : ITB.
- Porter, Michael. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press A Division of Macmillan, Inc., New York
- Pal, Leslie. A. 1997. *Beyond Policy Analysis*. ITP Nelson A Division of Thompson, Canada.
- Starling, Grover. 1988. *Strategies for Policy Making*. The Dorsey Press. Chicago.